# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Di Indonesia terdapat banyak lembaga yang bergerak pada sektor keuangan. Lembaga keuangan adalah institusi yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan keuangan, yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana (Yusuf, 2015). Kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap performa usaha dan merencanakan tujuan di masa yang akan datang. Berbagai informasi dihimpun agar pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis lembaga keuangan yang dipimpinnya.

Gambaran mengenai kinerja perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni informasi finansial dan informasi non finansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya yang merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Menurut (M. Munandar, 2007), penyusunan anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Sedangkan informasi non finansial adalah Informasi yang tidak berkaitan dengan keuangan. (Haller, 2017) menyatakan bahwa Informasi non-finansial merupakan informasi tentang entitas kinerja (Haller, 2017).

Kedua informasi di atas dapat dianalisis menggunakan beberapa model pengukuran kinerja perusahaan, salah satunya dengan menggunakan metode *balanced scorecard*. *Balanced scorecard* hadir untuk menggantikan konsep *scorecard* model lama yang hanya mengejar profitabilitas jangka pendek saja. *Balanced scorecard* merupakan kerangka kerja komprehensif untuk menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu, tersusun dalam empat perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Hardiyanto dkk: 2005). Dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan sebuah lembaga keuangan, pengukuran kinerja beserta evaluasinya sangat penting bagi kemajuan usaha, kinerja dapat dijadikan tolak ukur dalam mengetahui keberhasilan dalam sebuah usaha. Selain itu pengukuran kinerja juga dapat memperlihatkan kontribusi para pimpinan terhadap keberlangsungan usaha yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja yang banyak digunakan dalam lembaga perkreditan desa adalah berdasarkan pendekatan tradisional.

Lembaga Perkreditan Desa atau LPD merupakan lembaga keuangan non Bank yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan pada masyarakat desa, untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mendukung krama desa untuk bisa memanfaatkan peluang usaha yang terbuka di sekitar Desa Pakraman yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat pembangunan ekonomi masyarakat di daerah Bali. LPD diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk badan usaha keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa (Nurjaya, 2011). Sedangkan menurut (D. dan Suartana, 2018) Lembaga Perkreditan Desa

merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya kepada anggotanya sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, diperkuat serta dilestarikan keberadaannya. Saat ini masih ada Lembaga Perkreditan Desa yang mengukur kinerjanya hanya berdasarkan pada tolak ukur keuangannya saja atau dari tingkat pendapatan (laba) yang diperoleh usahanya.

Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks seperti saat ini, pengukuran kinerja yang hanya berdasarkan tolak ukur keuangan sudah tidak lagi memadai karena mempunyai banyak kelemahan, antara lain : pemakaian kinerja keuangan sebagai satu-satunya penentu pendapatan usaha untuk bisa mendorong pimpinan untuk mengambil tindakan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjangnya. Hal tersebut diwujudkan melalui : 1) tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, 2) memberantas sistem ijon, gadai gelap dan lain-lain yang bisa disamakan dengan itu di pedesaan, 3) menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan, baik yang bisa ditampung oleh usaha-usaha produktif masyarakat dan 4) meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa (profile LPD, 2004).

Selain hal tersebut adapun tujuan LPD menurut (Nurjaya, 2011) sebagai berikut: 1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, 2. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan, 3. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Oleh karena itu setiap Lembaga Perkreditan Desa harus

menginvestasikan dan mengelola asset intelektual. Kesuksesan lembaga keuangan tidak dapat dimotivasi atau diukur dalam jangka pendek dengan model akuntansi keuangan tradisional saja tetapi diperlukan juga waktu yang sesuai dengan kebutuhan serta pertumbuhan keuangan.

Oleh karena itu *Balance Scorecard* merupakan kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan ukuran yang diperoleh dari strategi yang ada dalam suatu usaha. Dengan tetap mempertahankan ukuran keuangan dari *performance* sebelumnya. *Balance Scorecard* memperkenalkan driver tambahan yang meliputi pada nasabah, proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan, Robert, S., 2000). Pasal 7 ayat (1) Perda LPD No. 8/2002 berkaitan dengan lapangan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Perkreditan Desa. Lapangan usaha di daerah mencakup: a. Menerima dan menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk keuangan dan deposito, b. Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa, c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lainnya dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana, d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Berdasarkan implementasinya Lembaga Keuangan Desa bergerak dalam usaha simpan pinjam, dimana produk jasa yang ditawarkan yaitu tabungan, deposito dan pinjaman dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit yang efektif. LPD menyediakan pelayanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat desa termasuk penduduk miskin. Sedangkan dari segi pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu prosedur

yang sederhana, proses yang singkat, pendekatan personal, serta kedekatan lokasi dengan nasabah menjadi faktor keberhasilan dalam menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat desa, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa adat, dalam hal ini pusat pelayanan kegiatan perekonomian pedesaan yang berdaya guna dan berhasil guna yang dimiliki oleh desa itu sendiri, untuk keperluan masyarakat dan pembangunan pedesaan. Untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga, kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan di masa mendatang.

Menurut (Wibisono, 2006) menjelaskan bahwa kinerja adalah melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Menurut (Moeheriono, 2010), pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efesiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Berbagai informasi dihimpun agar pekerjaan yang dilakukan dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan.

Hal ini dilakukan untuk menginterpretasikan segala sesuatu terkait dengan efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses keberlangsungan lembaga itu sendiri. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui gambaran terkait kinerja perusahaan yang dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu informasi finansial dan informasi non finansial. Berdasarkan pengertiannya informasi finansial didapatkan dari

penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi non finansial merupakan faktor kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

*Balanced Scorecard* adalah sistem pengukuran yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya, diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Pengertian *Balanced Scorecard* menurut (Mulyadi, 2014), *Balanced Scorecard* terdiri dari dua kata: kartu skor (*scorecard*) dan berimbang (*balance*). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel masa depan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Konsep ini berusaha untuk menyeimbangkan pengukuran aspek keuangan dengan aspek non keuangan yang secara umum dinamakan *Balanced Scorecard*.

Konsep berbasis *Balanced Scorecard* merupakan suatu sarana untuk mengkomunikasikan persepsi strategis dalam suatu perusahaan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh berbagai pihak dalam perusahaan, terutama pihak-pihak dalam organisasi yang akan merumuskan strategi perusahaan (Wahyuni, 2008). Dalam akuntansi, *Balanced Scorecard* bukan hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik secara total kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Konsep ini berusaha untuk menyeimbangkan pengukuran aspek keuangan dengan aspek non keuangan yang secara umum dinamakan *Balanced Scorecard*. Konsep berbasis *Balanced*

*Scorecard* merupakan suatu sarana untuk mengkomunikasikan persepsi strategis dalam suatu perusahaan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh berbagai pihak dalam perusahaan, terutama pihak-pihak dalam organisasi yang akan merumuskan strategi perusahaan (Wahyuni, 2008). Penilaian kinerja memegang peranan penting dalam setiap aspek dunia usaha, karena dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui seberapakah efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penetapan strategi serta implementasinya dalam kurun waktu tertentu.

Didalam sistem pengendalian manajemen pada dunia bisnis, pengukuran kinerja merupakan usaha yang dilakukan pihak mengelola aset tak berwujudnya. Kemampuan baru ini lebih menguntungkan perusahaan daripada melakukan investasi pada pengelolaan aset fisik atau berwujud (Zudia, 2010). Dengan pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya merupakan ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan agar dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. Penilaian kinerja memegang peranan penting dalam setiap aspek dunia usaha, karena dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui seberapakah efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penetapan strategi serta implementasinya dalam kurun waktu tertentu.

Didalam sistem pengendalian manajemen pada dunia bisnis, pengukuran kinerja merupakan usaha yang dilakukan pihak mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masa yang akan datang. Serta menunjukkan bagaimana perusahaan menyempurnakan prestasi keuangannya (Tunggal, 2002:1). Premis utama dari pendekatan *Balanced Scorecard* adalah bahwa metrik akuntansi keuangan yang secara tradisional diikuti perusahaan untuk memantau tujuan strategis mereka tidak cukup untuk

menjaga perusahaan tetap pada jalurnya. Hasil keuangan menjelaskan apa yang telah terjadi di masa lalu, bukan ke mana arah bisnis atau seharusnya. *Financial perspective* atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan.

Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas. Agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Ada tiga tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu: pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja, ketiga tolak ukur di atas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis. Dengan begitu, pemilik perusahaan mengetahui di tahap mana perusahaan tersebut berada. LPD dalam hal ini bergerak dibidang jasa keuangan, wajib melakukan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja dalam melakukan pencapaian target yang tidak hanya dinilai dari aspek keuangan saja, tetapi juga dinilai dari aspek non keuangan.

Secara umum pengukuran kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menggunakan metode tradisional yaitu pengukuran kinerja analisis rasio pada aspek keuangan saja dan tidak menjangkau aspek yang lain. Penilaian kinerja memegang peranan penting dalam setiap aspek dunia usaha, karena dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui seberapakah efektivitas, efisiensi, dan

ekonomis penetapan strategi serta implementasinya dalam kurun waktu tertentu. Didalam sistem pengendalian manajemen pada dunia bisnis, pengukuran kinerja merupakan usaha yang dilakukan pihak hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban yang dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan (Widayanto, 1993 dalam Supriadi, 2014).

Dalam penelitian ini Lembaga Perkreditan Desa Banyuning dimana masih belum menggunakan metode *Balanced Scorecard* sebagai pengukuran kinerjanya, dimana masih menggunakan metode manual yang hanya melihat berdasarkan pada tolak ukur keuangannya saja atau dari tingkat pendapatan (laba), dan alasan kedua peneliti memilih Lembaga Perkreditan Desa Banyuning adalah karena terjadinya kondisi persaingan yang semakin kompetitif antar lembaga keuangan, menjadi alasan pemilihan lokasi karena telah banyak lembaga keuangan selain LPD seperti LPD, bank perkreditan rakyat, dan bank umum berkembang di Kecamatan Buleleng khususnya di Singaraja.

Singaraja memiliki berbagai tujuan wisata seperti kolam renang, warung makan, tempat nongkrong dan masih banyak lagi, hal ini menuntut semakin banyaknya berdiri lembaga keuangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi persaingan yang kompetitif ini menuntut pihak LPD di Desa Banyuning untuk menunjukan keunggulannya, yaitu dengan penggunaan sistem *Balanced Scorecard* dengan penerapan program ini diharapkan agar mampu menghasilkan informasi yang berkualitas tentang laporan pendapatan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

*Balance Scorecard* (BSC) terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Saat ini, *Balance Scorecard* (BSC) sudah berkembang dan mengalami evolusi dari hanya sekedar cara untuk melakukan evaluasi kinerja. Kemudian disempurnakan menjadi metode yang dapat dipakai sebagai alat untuk merumuskan strategi dan melakukan perubahan. Terakhir, *Balance Scorecard* (BSC) semakin populer karena telah diintegrasikan dengan berbagai metode strategi bisnis yang terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan. Pengukuran dengan metode *Balanced Scorecard* menjadi faktor penting untuk kepentingan pengukuran kinerja lembaga selain untuk pengukuran kinerja secara tradisional atau dengan kinerja keuangan saja dianggap hanya memberikan informasi kepada manajemen untuk membentuk strategi jangka pendek. Sehingga *Balanced Scorecard* dianggap dapat memberikan pengukuran kinerja yang lengkap karena terdiri dari beberapa perspektif dan dapat memberikan informasi yang lebih menyeluruh, sehingga dapat disusun strategi keberhasilan lembaga dalam jangka panjang.

Menurut (W. Suartana, 2009) ada beberapa faktor yang menyebabkan belum majunya LPD, yaitu 1) tidak siapnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola usaha ini, 2) tidak adanya komitmen pengampu kepentingan di Desa Pakraman untuk memajukan Desa Pakraman, 3) warga desa tidak kompak mendukung keberadaannya, dan 4) belum dipahaminya secara benar bahwa itu adalah suatu kesatuan usaha yang memiliki otonomi dan diskresi dalam mengelola usahanya. Dengan adanya lembaga keuangan di suatu desa diharapkan angka kemiskinan pada daerah lingkup Lembaga Perkreditan Desa menjadi menurun. Pendapat tersebut mengacu pada kondisi Lembaga Perkreditan Desa Banyuning

saat ini, masih terdapat beberapa anggota atau karyawan yang belum memahami secara benar bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu kesatuan usaha yang memiliki otonomi dan diskresi dalam mengelola usahanya.

Berdasarkan hasil data perkembangan LPD menurut perolehan laba di kecamatan buleleng pada tahun 2018-2020 melalui Badan Statistik Keuangan bahwa masih terdapat beberapa LPD yang kondisi perkembangan pertumbuhan laba/aset dikatagorikan kurang sehat, masih terdapat beberapa LPD yang memiliki status kurang sehat, cukup sehat bahkan macet sekaligus tidak beroperarasi lagi. Perkembangan perolehan laba pada masing-masing LPD paling tertinggi di tahun 2019 diduduki oleh LPD Anturan yakni sebesar Rp 2.429.261, sedangkan pendapatan terendah terdapat dibeberapa LPD diantaranya LPD Bangkang, Banyualit, Buleleng, Galiran, Padang keling dan LPD Sari Mekar yakni pendapatan paling rendah sebesar 63 rupiah (data pada lampiran).

Tahun 2020 berdasarkan perolehan laba LPD di Kecamatan Buleleng masih dalam kategori cukup sehat. Terutama pada LPD Banyuning yang dijadikan sebagai subjek penelitian bahwa LPD Banyuning masih dikategorikan Cukup Sehat dalam perkembangan aset dan laba LPD tersebut yakni hanya sebesar Rp 93,689 untuk laba pertahunnya dan sebesar Rp 41.295.019 untuk perolehan aset pertahunnya. Hal tersebut menandakan terjadi penurunan pada perolehan laba dan aset dari tahun 2019 yakni perolehan laba sebesar Rp 1.281.704 sedangkan perolehan aset sebesar Rp 45.822618. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil sampel LPD Banyuning yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara awal bahwa masih terdapat beberapa karyawan LPD Banyuning yang masih belum memahami pentingnya penelitian kinerja LPD itu

dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik perspektif dari perkembangan kinerja keuangan, karyawan bahkan perspektif nasabah itu sendiri. Bersumber pada wawancara melalui observasi awal, maka didapat capaian seperti berikut :

Bapak Marjaya selaku ketua LPD menyatakan bahwa :

> Memang masih ada beberapa karyawan yang masih terkendala untuk mengoperasikan komputer. Hal ini karena usia dan jenjang pendidikan, jadi ya cukup menyulitkan bagi kami untuk dapat merealisasikan kinerja dengan baik. Makanya penting untuk adanya penyelenggaraan pelatihan bagi karyawan dengan tujuan untuk menunjang kompetensi pengembangan karir.

Kemudian Ibu Komang Handayani menyatakan bahwa:

> Menurut saya secara personal, memang sangat perlu untuk adanya pelatihan bagi karyawan. Kenyatannya kan gak semua karyawan memiliki kompetensi yang sama untuk melaksanakan pekerjaan. Selain itu masih minim pngetahuan beberapa karyawan terkait dengan aspek aspek yang secara formalitas dapat dinilai dari berbagai aspek seperti, aspek keuangan, sdm, nasabah/pelanggan dan aspek pelayanan, belum semuanya paham betul.

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh, yang mana sangat penting untuk memperhatikan segala aspek yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan oleh peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Konsep *Balance Scorecard* (Studi Kasus PT. Wijaya Karya)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bukti empiris tentang kinerja organisasi objek penelitian dengan menggunakan konsep *Balanced Scorecard*. Sebagian besar dari hasil penelitian menemukan bahwa kinerja pada masing-masing organisasi adalah baik, dan dengan konsep berbasis *Balanced Scorecard* diharapkan adanya penilaian yang lebih signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Susila, 2016) dengan judul “Pengukuran Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Susut Dengan Analisis *Balanced*

*Scorecard*. Penilaian kinerja LPD secara keseluruhan yang dinilai dengan metode *Balanced Scorecard* berada pada kategori cukup baik, karena diperoleh skor sebesar 2089,13 dan skor ini berada pada interval 1359-2716. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa kinerja LPD masih perlu ditingkatkan agar berada pada kategori sangat baik dengan meningkatkan kinerja dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Bersumber pada hasil penelitian terdahlu, adapula kebaharuan dalam penelitian saat ini adalah penelitian saat ini menggunkan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan cara menganalisis tentang *Balanced Scorecard*. Hal tersebut diIakukan dengan tujuan agar mudah untuk mengetahui seperti apa kondisi objek penelitian. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, objek dan subjek yang dipiIih. Lokasi dalam penelitian ini ialah LPD Desa Pakraman Banyuning dengan menggunakan instumen uji validitas dan reliabilitas sebagai tolak ukur dalam perspektif nasabah dan persepektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Kemudian pemilihan lokasi, obyek, subjek didasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya: lokasi dipilih karena relevan dengan judul penelitian, serta mengingat jumlah sampel yang mencukupi akan menjamin kecukupan untuk digunakan dalam penelitian. Subjek dipilih, karena penulis ingin mengetahui seperti apa kemampuan LPD terkait *Balanced Scorecard* yang terdiri dari emdpat perspektif yang berbeda yaitu : 1. Perpektif keuangan, 2. Perspektif pelanggan, 3. Perspektif proses bisnis internal, 4. Persepektif pertumbuhan dan pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja suatu lembaga dengan

menggunakan konsep *Balanced Scorecard*. Mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Perkreditan Desa di Banyuning penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema: "Analisis Kinerja Lembaga Perkreditan Desa menggunakan metode *Balanced Scorecard* (Studi Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa Banyuning)". Karena hingga saat ini lembaga perkreditan desa Banyuning belum menggunakan *Balanced Scorecard* untuk mengukur kinerjanya.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. LPD Desa Pakraman Banyuning masih belum menerapkan metode *Balanced Scorecard* sebagai pengukuran kinerjanya.
2. Belum adanya komitmen pengampu kepentingan di Desa Pakraman untuk memajukan LPD.
3. Belum dipahaminya secara benar bahwa LPD itu adalah suatu kesatuan usaha yang memiliki otonomi dan diskresi dalam mengelola usahanya.
4. Masih perlu pemahaman tentang pentingnya menilai kinerja LPD dari berbagai sisi yakni menilai dari sisi laporan keuangan dan penilaian dari sisi non keuangan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan

pada Analisis Kinerja Lembaga Perkreditan Desa menggunakan metode *Balanced Scorecard* (Studi Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa Banyuning) tahun 2018-2020.

## 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana Kinerja Lembaga Perkreditan Desa menggunakan metode *Balanced Scorecard* pada Lembaga Perkreditan Desa Banyuning.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang menganalisis dan menguji bagaimana Kinerja Lembaga Perkreditan Desa menggunakan metode *Balanced Scorecard* pada Lembaga Perkreditan Desa Banyuning.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut,diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan khususnya di akuntansi tentang Analisis Kinerja Lembaga Perkreditan Desa menggunakan metode *Balanced Scorecard* (Studi Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa

Banyuning).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran informasi kepada individu, sosial dan pelaku usaha terkait metode *Balanced Scorecard* serta masukan yang berguna mengenai perlunya penerapan metode *balanced scorecard* bagi pihak pimpinan Lembaga Perkreditan Desa Banyuning untuk mengetahui kinerja yang dimiliki dalam periode tertentu.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA